

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN *THE ASEAN
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM TERKAIT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

SOFIA ALJANAH

1510111009

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



Pembimbing :

Dr. Ferdy, S.H., M.H

Dr. Delfiyanti, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN *THE ASEAN
TRANSBOUNDRY HAZE POLLUTION* DALAM RANGKA PENEGAKAN
HUKUM TERKAIT KEBAKARAN HUTAN
DI INDONESIA**

(Sofia Aljanah 1510111009, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019, 72
Halaman)

Pembimbing : Dr. Ferdi, S.H., M.H. Dan Dr. Delfi Yanti, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan timbulnya kabut asap lintas batas negara sesuai dengan perjanjian internasional *Agreement ASEAN Transboundry Haze Pollution* yang diratifikasi oleh negara Indonesia menjadi Undang-Undang No 26 Tahun 2014 tentang. Pengesahan *ASEAN Agreement On Transboundry Haze Pollution*. Masalah kabut asap akibat dari kebakaran hutan di Indonesia inilah menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang menyebabkan negara-negara tetangga merasakan imbas dari kebakaran hutan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap perjanjian *The ASEAN Transboundry Haze Pollution* dalam rangka penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan bagaimana implementasi *The ASEAN Transboundry Haze Pollution* terkait kebakaran hutan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan teknik penulisan yuridis normative dimana pendekatan penelitian akan menggunakan kajian kepustakaan atau *library research*. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa, pertama *The ASEAN Agreement Transboundry on Haze Pollution* sudah di ratifikasi oleh Indonesia Indonesia meratifikasi *The ASEAN Agreement Transboundry on Haze Pollution* sebagai tujuan untuk mencegah terjadinya bencana kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan. Pencegahan ini dimulai dari kerja sama atau melakukan upaya bersama dengan Negara-negara anggota ASEAN baik regional maupun Internasional. Kerja sama antar Negara di ASEAN dalam menangani dan mengurangi polusi lintas batas Negara akibat dari kebakaran hutan upaya yang dilakukan dengan mendirikan *National Focal Points*, memperbesar peran *the ASEAN Specialized Meteorological Center (ASMC)*, menetapkan prosedur pelaporan kebakaran, menetapkan indeks kualitas udara bersama (*common air quality index*) dan mengharmoniskan teknik sampel kualitas udara, mengembangkan system derajat bahaya regional, berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencegah dan memitigasi kebakaran hutan. Kedua implementasi *The ASEAN Agreement Transboundry on Haze Pollution* ini merupakan upaya dalam tindakan penegakan hukum untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sarana penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 pasal 3 dan 15 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 pasal 25 ayat (2).

Kata Kunci : Analisis Yuridis; Perjanjian *The ASEAN Transboundry Haze Pollution*; Penegakan Hukum; Kebakaran Hutan dan Indonesia.